

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara mengenai perlindungan dari perlakuan diskriminatif yang terdapat pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya banyak dijumpai perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa. Dengan populasi dua sampai tiga persen dari total populasi, etnis Tionghoa adalah salah satu dari kelompok etnis minoritas di Indonesia (Mackie 2005). Profesor Wang Gungwu (Hoon 2006, 1) menggambarkan minoritas ini sebagai sesuatu yang “unik”, karena identitas etnis Tionghoa di Indonesia lebih bermasalah dibandingkan etnis Tionghoa di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Salah satu kasus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa adalah pada masa Orde Baru, yang diberlakukan kebijakan asimilasi yang mempengaruhi kehidupan sosial-budaya etnis Tionghoa (Chessigi 2018, 117). Suryadinata mengatakan bahwa pemerintah membatasi penggunaan bahasa Tionghoa dengan mengeluarkan larangan untuk bersekolah di sekolah dengan bahasa Tionghoa sebagai pengantarnya (Nurda 2014, 5). Selain dalam pendidikan dan bahasa, praktik agama dan adat istiadat juga dibatasi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Hal ini membatasi ruang praktik agama dan adat istiadat masyarakat Tionghoa dengan hanya diperbolehkan dalam lingkungan keluarga.

Masyarakat etnis Tionghoa telah mengalami penganiayaan jauh sebelum Orde Baru, tetapi dari masa pemerintahan Belanda di Jawa tahun 1740. Masa pemerintahan Belanda adalah waktu munculnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme pada masa pemerintahan Belanda adalah manifestasi usaha menolak kolonialisme. Nasionalisme Indonesia terciptakan dari keinginan kolektif untuk merdeka (Pranoto 2001, 6). Semua etnis, termasuk Tionghoa, mengejar keinginan ini.

Beberapa tindakan konkret nasionalisme dalam etnis Tionghoa di Indonesia adalah dengan mendirikan *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) pada tahun 1900 di Jakarta. Namun, THHK merupakan nasionalisme yang berorientasi pada Tiongkok yang berfokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan (Zein 2000, 146-151). Terdapat juga kelompok nasionalisme intelektual Tionghoa yang berpendidikan Belanda dan berorientasi kepada Hindia Belanda yang diwakili oleh *Chung Hua Hui* (CHH) (Suryadinata & Subono 2005, 5). Partai Tionghoa Indonesia (PTI) juga dibentuk sebagai golongan nasionalis etnis Tionghoa yang berorientasi pada Indonesia (Suryadinata & Subono 2005, 6).

Walaupun terdapat bukti peran orang Tionghoa, dalam sejarah hampir tidak pernah dijelaskan bukti sumbangsih etnis Tionghoa bagi perkembangan Indonesia. Padahal banyak bukti yang menunjukkan sumbangsih dalam perkembangan Indonesia, termasuk pada bidang agama, sastra, bahasa, seni, olahraga, dan lainnya (Kong 2005). Orang Tionghoa hanya digambarkan sebagai “binatang ekonomi” (*economic animal*) yang bersifat oportunis, tidak memiliki loyalitas politik, tidak nasionalis, dan egois (Kwartanada 1996). Sejak kolonialisme Belanda, etnis Tionghoa telah menjadi sasaran empuk permusuhan sosial yang berpuncak pada kekerasan Mei 1998 (Hoon 2006, 1).

Tragedi Mei 1998 dimulai dari demonstrasi mahasiswa menuntut Soeharto, presiden kedua Indonesia untuk turun dari jabatannya. Demonstran juga menuntut reformasi total pemerintahan untuk lebih berpihak kepada rakyat (Goenawan 2015). Mahasiswa, termasuk yang berasal dari Trisakti melakukan demonstrasi besar ke gedung DPR/MPR. Aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara dihambat blokade dari POLRI dan Militer. Aksi damai tersebut berubah saat aparat keamanan mulai menembakkan, membuat mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar mahasiswa berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Pada pukul 20.00 WIB dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak.

Setelah lebih dari 30 tahun memegang kekuasaan, Presiden kedua Indonesia, Soeharto berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998 (Galih 2018). Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjauhkan diri dari ideologi pemerintahan sebelumnya dan untuk menunjukkan komitmen terhadap Reformasi dan perubahan, pembuat kebijakan pasca-Orde Baru mengadopsi kebijakan multikulturalisme dan mengubah aturan-aturan yang bersifat diskriminatif terhadap Tionghoa (Hoon 2006, 120). Seperti pada Mei 1999, Presiden Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No.4/1999 yang memperbolehkan pengajaran bahasa Mandarin dan menghapus regulasi yang mengharuskan masyarakat etnis Tionghoa untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) saat mendaftar sekolah atau membuat aplikasi-aplikasi resmi.

Pasca-Orde Baru menuju Reformasi menunjukkan kebangkitan identitas Tionghoa yang tercermin dari kebangkitan surat kabar Tionghoa, adat istiadat, agama, dan bahasa (Hoon 2006, 120). Walaupun kebijakan pemerintahan yang mendukung etnis Tionghoa,

masih terdapat kemarahan dan ketakutan yang dirasakan karena kekerasan 1998 (Franciska 2014). Franciska (2014) mengatakan orang tuanya berkata kepadanya bahwa orang Tionghoa tidak membicarakan perasaannya, namun trauma kejadian tersebut masih sangat dirasakan. Hal yang dirasakan masyarakat etnis Tionghoa Pasca-Orde Baru menuju Reformasi tersebut yang ingin ditunjukkan.

Dikemas dalam sebuah cerita yang mengangkat topik kematian. Dukacita adalah hal universal yang nyata dan dialami seluruh manusia. Dukacita atau *grief* dalam bahasa inggris dapat diartikan sebagai rasa kehilangan yang akut dan lebih dari batas normal. Hal tersebut merupakan pengalaman fenomenologi (Osterweis, Solomon, & Green 1984). Bukan merupakan emosi spesifik, tetapi pencampuran dari berbagai rasa, pikiran, sensasi, gerak-gerik, dan tingkah laku.

Istilah lain yang sering digunakan juga adalah *bereavement* (kehilangan) yang mengacu pada penderitaan diakibatkan oleh kematian. Menurut Sanders (1989) Hal tersebut adalah istilah global yang mengacu pada spektrum yang luas dari emosi, perubahan, dan kondisi yang terjadi setelah kehilangan seseorang. *Mourning* atau perkabungan mengacu pada ekspresi eksternal dari pengalaman internal. Hal tersebut merupakan manifestasi terluar dari dukacita.

Ketiga istilah tersebut berhubungan erat dengan kematian, yang merupakan hal menyakitkan yang tidak dapat dihindari siapapun, tanpa melihat usia. Tak hanya orang yang sudah tua saja, namun anak kecil juga dapat mengalami kematian dini. Menurut Worldometers, angka kematian di Indonesia adalah 15,9 per 1000 bayi dan 21 per 1000 anak dibawah umur 5, dilihat antara tahun 1950 sampai sekarang. Kematian anak dapat

memberikan dampak jangka panjang bagi orang tua (Arnold & Gemma 2008; Rando 1986; Rubin & Malkinson 2001; Sanders 1989).

Kehilangan yang dialami orang tua akibat kematian anaknya diasosiasikan dengan reaksi kesedihan yang kuat dibanding dari tipe-tipe lain, seringkali dikatakan sebagai kehilangan terburuk untuk dialami seseorang (Sanders 1989), dikarenakan kematian dari seorang anak menentang ekspektasi dari rangkaian kejadian dalam hidup (Rogers, Floyd, Seltzer, Greenberg, & Hong 2008). Dari penelitian dikatakan bahwa kedukaan pada orang tua adalah proses yang kompleks, multidimensional, dengan ragam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari kedukaan tersebut (Aho, Tarkka, Astedt-Kurki, Sorvari, & Kaunonen 2011). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti contoh yaitu perbedaan gender (Stroebe, Schut, & Stroebe 2007) mempengaruhi intensitas kesedihan yang dialami. Ayah akan cenderung mengalami tingkatan kesedihan lebih rendah dibanding ibu. Seorang ibu cenderung berkabung dalam jangka waktu yang lebih lama, lebih terbuka, dan mengekspresikan perasaan secara verbal dibandingkan ayah (Rosenblatt 2000).

Kehilangan anak dapat berdampak juga dalam keutuhan keluarga. Berbagai penelitian mengatakan bahwa pasangan yang memiliki anak lebih cenderung tidak berpisah dibandingkan pasangan tanpa anak (Andersson 1997; Waite & Liliard 1991). Penelitian mengenai dampak kematian pada anak dengan perceraian oleh Torkild Hovde Lyngstad (2013) memiliki hasil yaitu keluarga yang terkena musibah kehilangan anak memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi yang berdampak tak hanya dari kehilangan anak, namun termasuk dari tekanan dan cara menghadapi tragedi tersebut.

Maka dari itu pembelajaran mengatasi kehilangan dalam keluarga penting dipaparkan. Dengan menggunakan media audio visual yang menggabungkan gambar, animasi, video, huruf, suara, dan interaksi (Mishra & Yada 2004). Salah satu media audio visual adalah film, yang menurut Effendi (1986) adalah media komunikasi massa audio visual yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada kelompok tertentu. Kracauer (1960), seorang jurnalis, sosiologis, kritikus budaya, dan ahli teori film berpendapat bahwa terdapat dua tipe dasar film, yaitu film naratif (*narrative films*/film yang memiliki jalan cerita) dan film non naratif (*nonnarrative films*/ film yang tidak memiliki jalan cerita yang jelas). Ia membagi kedua tipe ini menjadi '*films of fact*' dan film eksperimental/*avant-garde*. Film Naratif menurutnya adalah film terpenting dan yang terdasar. Hal yang mirip ditulis menurut Williams (1984), namun sebelum film dibagi dalam *subgenre*, ia mengelompokkan film menjadi tiga, film naratif, film eksperimental/*avant-garde*, dan film dokumenter. Pengelompokan ini didukung oleh Bordwell (1985), dengan penjelasan tipe film naratif dominan di *Hollywood* dengan jalan cerita yang runtut dan jelas.

Dengan menggunakan film naratif, topik mengatasi kehilangan dalam keluarga akan diangkat dalam film *Terkisah Lampu*. Menceritakan pasangan suami istri, Tjandra dan Leni yang mendapat kabar kematian putranya pada tahun 1998. Mengangkat kesulitan menghadapi kematian, dilema identitas Tionghoa di Indonesia yang berhubungan dengan tradisi kematian. Cerita dikemas dalam film fiksi drama.

1.2. Identifikasi Masalah

Latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam projek tugas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan riset suasana Indonesia pada tahun 1998.
2. Mencari referensi visual tata lokasi, rias, dan kostum di Indonesia pada tahun 1998.
3. Penggambaran keluarga Tionghoa di Indonesia melalui tata lokasi, rias, dan kostum.
4. Penggambaran Indonesia tahun 1998 melalui tata lokasi, rias, dan kostum.
5. Menunjukkan suasana kesedihan dan menegangkan dalam keluarga.

1.3. Batasan Masalah

Dalam karya proyek akhir ini akan dibatasi pada perancangan tata lokasi, rias, dan kostum.

1.4. Tujuan

Karya tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan film fiksi dengan *genre* drama, yang mengangkat karakter Tjandra dan Leni, sepasang suami istri yang menghadapi kematian anaknya. Dengan tujuan memaparkan realita yang dihadapi etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, memaparkan sejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, dan

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu yang terjadi dalam menghadapi kematian seorang anak dalam keluarga.

1.5. Manfaat

Manfaat pembuatan film *Terkisah Lampu* adalah:

1.5.1. Untuk Masyarakat

Proyek ini diharapkan dapat menunjukkan realita keadaan Indonesia pada tahun 1998, khususnya dari sudut pandang masyarakat etnis Tionghoa. Selain itu, memaparkan tragedi kehilangan anak dalam keluarga dan pentingnya menghadapi kehilangan dengan cara yang benar. Dengan adanya karya tugas akhir ini masyarakat dapat lebih mengerti budaya dan identitas etnis Tionghoa.

1.5.2. Untuk Keilmuan

Dapat menjadi referensi dalam pencarian dan pengaplikasian sejarah ke dalam tata artistik film fiksi bagi pelajar lainnya ataupun orang awam yang tertarik.

1.5.3. Untuk Penulis

Diharapkan mampu mengeksplorasi tema dan konsep lalu menerapkannya dalam tata artistik film untuk memperkuat cerita serta memberikan pengalaman sebagai penata artistik produksi film pendek.